

Vol. 8, No.1, Januari 2009

RELIGI

JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA

Agama & Pemberdayaan Sosial



**Menjadi Diri Sendiri sebagai Modal Dasar
Kemajuan Muslim dalam Pencarian Autentisitas**

(Studi atas Pemikiran Robert D.Lee)

Dian Nur Anna

Zakat dan Pemberdayaan Sosial

(Studi atas Rumah Zakat Indonesia di Yogyakarta)

Muryana

**Keberagamaan Impersonal dan Personal di
Tengah Pluralisme Agama dan Multikulturalisme**

Alim Roswantoro

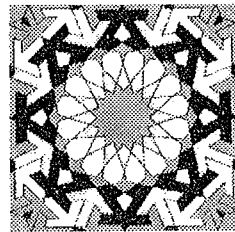
ISSN: 1412-2634

Vol. VIII, No. 1, Januari 2009

RELIGI

JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA

Agama & Pemberdayaan Sosial



**Menjadi Diri Sendiri sebagai Modal Dasar
Kemajuan Muslim dalam Pencarian Autentisitas
(Studi atas Pemikiran Robert D.Lee)**

Dian Nur Anna

**Zakat dan Pemberdayaan Sosial
(Studi atas Rumah Zakat Indonesia di Yogyakarta)**

Muryana

**Keberagamaan Impersonal dan Personal di
Tengah Pluralisme Agama dan Multikulturalisme**

Alim Roswanto

RELIGI

Vol. VIII, No. 1, Januari 2009

CATATAN REDAKSI

- ARTIKEL** 1 **Menjadi Diri Sendiri sebagai Modal Dasar
Kemajuan Muslim dalam Pencarian Autentisitas
(Studi atas Pemikiran Robert D.Lee)**
Dian Nur Anna, M.A.
- 21 **Zakat dan Pemberdayaan Sosial
(Studi atas Rumah Zakat Indonesia di
Yogyakarta)**
Muryana
- 37 **Keberagamaan Impersonal dan Personal di
Tengah Pluralisme Agama dan Multikulturalisme**
Alim Roswantoro
- 53 **Poligami dalam Tradisi Jawa: Membaca Wacana
"Dari Dalam" dan "Dari Luar"**
Ustadi Hamsah
- 59 ***Piety Flourished in God We Trust: Religious
Revival in The Midst of Twentieth Century
America***
Roma Ulinnuha
- 69 **Sistem Ekonomi Dualistik dalam Masyarakat
Plural Indonesia**
Rahmat Fajri
-
- RISET** 81 **Makna Simbolis Arsitektur Perumahan
Tradisional Hindu Bali**
M. Syamsul Hadi
-
- RESENSI** 95 **Mistisisme sebagai Matriks Baru dalam Dialog
Umat Islam-Kristen**
Erham Budi
-

SISTEM EKONOMI DUALISTIK DALAM MASYARAKAT PLURAL INDONESIA

Rahmat Fajri*

Abstrak

Realitas masyarakat Indonesia tidak saja majemuk dari segi agama, suku dan bahasa, akan tetapi juga dari segi sistem ekonomi yang berlaku, yaitu sistem ekonomi dualistik sebagai salah satu model sistem ekonomi campuran di luar sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam sistem dualistik ini sejak zaman kolonial Belanda berlaku sektor modern dan sektor tradisional yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kehendak bersama di antara pelaku-pelaku ekonominya. Sektor modern yang lebih berorientasi profit yang maksimal dan masuk dalam jaringan ekonomi global hampir semuanya dikuasai orang asing dan keturunan asing, sementara sektor tradisional lebih berorientasi pada motif-motif untuk memelihara keamanan dan sistem yang sudah ada, tidak berorientasi pada keuntungan maksimal, dikuasai oleh mayoritas Pribumi, sehingga membentuk stratifikasi kekayaan yang sangat timpang. Bahkan hingga sekarang sektor formal (modern) yang memang sophisticated, tetap lebih unggul, namun demikian sektor informal yang terbukti lebih mampu menyerap banyak angkatan kerja, nasibnya termarginalkan, dan afirmasi pemerintah tak kunjung mengubah posisi mereka berhadapan dengan sektor modern.

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi alternatif di luar sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini terlihat dari dua model sistem perekonomian yang berkembang dalam suatu negara yang pertama kali dikemukakan oleh J.H. Boeke dengan istilah ekonomi dualistik.¹ Munculnya sistem ekonomi ini agaknya dilatarbelakangi oleh kondisi dan struktur masyarakat. Seperti J.S. Furnivall mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda adalah merupakan suatu masyarakat yang majemuk (*plural society*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Masyarakat majemuk Indonesia ia sebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda yang secara kuantitas minoritas (kendati jumlahnya semakin bertambah

¹ Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 5.1

terutama pada akhir abad ke-19) adalah penguasa yang memerintah bagian amat besar orang-orang Indonesia pribumi, yang menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri, sementara orang-orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut di atas.²

Tulisan ini akan membahas masalah sistem ekonomi dualistik, bagaimana setting sosialnya, dan bagaimana implementasinya?

B. Tidak ada kehendak bersama (*common will*).

Di masa kolonial Belanda, kehidupan politik masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu ditandai dengan tidak adanya kehendak bersama.³ Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan ras, sehingga masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu ketimbang sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Keadaan mereka dapat digambarkan sebagai berikut. Orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, akan tetapi mereka tidak tinggal menetap di sana. Kehidupannya semata-mata berada di sekitar pekerjaannya itu, dan mereka memandang masalah-masalah kemasyarakatan, politik ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara, melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Banyak di antara mereka yang tinggal di Indonesia lebih dari dua puluh tahun, akan tetapi sesudah itu mereka kembali ke negerinya untuk menghabiskan sisa hidup mereka, dengan pengetahuan tentang Indonesia tidak lebih dari pengetahuan mereka ketika pertama kali menginjak bumi Indonesia. Orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa, seperti halnya dengan orang-orang Belanda, juga datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Kehidupan orang-orang pribumi pun tidak utuh pula. Sebab kehidupan mereka tidaklah lebih dari pada kehidupan pelayan di negerinya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda merupakan suatu masyarakat yang tumbuh di atas sistem kasta tanpa ikatan agama. Orang-orang Belanda, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Indonesia pribumi, melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing, mempertahankan dan memelihara pola pikiran dan cara-cara hidup mereka masing-masing.

Oleh karena tidak adanya kehendak bersama tersebut, dalam kehidupan ekonomi menemukan pernyataannya di dalam bentuk tidak adanya *permintaan sosial* yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat (*common social demand*). Permintaan sosial tersebut tidak terorganisir, melainkan bersifat sektional. Golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan Pribumi, masing-masing

² Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 29.

³ Nasikun, *Sistem...*, hlm. 29-30.

memiliki pola permintaannya sendiri-sendiri. Tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat inilah yang membedakan karakter ekonomi majemuk (*plural economy*) dari suatu masyarakat majemuk, dengan ekonomi tunggal (*unitary economy*) dari suatu masyarakat yang bersifat homogen.⁴ Penggolongan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, mengakibatkan pola-pola produksi pun terbagi di atas dasar perbedaan ras pula, di mana masing-masing ras memiliki fungsi produksi sendiri-sendiri: orang-orang Belanda dalam bidang perkebunan, penduduk pribumi dalam bidang pertanian, dan orang-orang Tionghoa sebagai kelas pemasaran yang menjadi perantara di antara keduanya. Dan dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik kepentingan antara kota dan desa, antara kaum pemodal dan kaum buruh, terlebih lagi dalam masyarakat majemuk, maka konflik kepentingan tersebut menemukan sifatnya yang lebih tajam oleh karena perbedaan kepentingan ekonomi jatuh bersamaan dengan perbedaan ras.

Pluralitas masyarakat Indonesia seperti digambarkan Furnivall di atas, setelah kemerdekaan mengalami perubahan, pluralitas mesti dipahami dalam konteks perbedaan-perbedaan internal di antara golongan pribumi sendiri.

C. Ekonomi Dualistik

Kemajemukan suku-bangsa, agama dan regional merupakan dimensi-dimensi horizontal struktur masyarakat Indonesia. Sementara itu dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia yang semakin penting artinya dari waktu ke waktu adalah semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan. Dengan semakin meluasnya pertumbuhan sektor ekonomi modern beserta sistem administrasi nasional yang mengikutinya, maka terjadi kontras pelapisan sosial antara sejumlah besar yang secara ekonomi dan politik lemah pada lapisan bawah, dan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa pada lapisan atas. Proses tumbuhnya ketimpangan tersebut berakar dalam struktur ekonomi Indonesia pada zaman Hindia-Belanda yang oleh Boeke digambarkan sebagai *dual economy*.⁵

Dalam struktur ekonomi dualistik, dua macam sektor ekonomi yang sangat berbeda wataknya berhadapan satu sama lain. Sektor pertama berupa struktur ekonomi modern yang secara komersial lebih bersifat canggih (*sophisticated*), banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, dibimbing oleh motif-motif memperoleh keuntungan maksimal, dan dalam konteks masyarakat kolonial hampir sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang asing atau keturunan orang-orang asing, termasuk golongan penduduk Tionghoa, terutama yang berasal dari daerah-daerah metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Sedangkan sektor yang terpisah dari

⁴ Nasikun, *Sistem...*, hlm. 31-32.

⁵ Nasikun, *Sistem...*, hlm. 46.

sektor yang pertama adalah struktur ekonomi pedesaan yang bersifat tradisional, yang menurut teori ekonomi modern merupakan struktur ekonomi yang berorientasi kepada sikap-sikap konservatif, dibimbing oleh motif-motif untuk memelihara keamanan dan kelanggengan sistem yang sudah ada, tidak berminat pada usaha-usaha untuk memperoleh keuntungan dan penggunaan sumber-sumber secara maksimal, lebih berorientasi pada motif-motif untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan sosial ketimbang menanggapi rangsangan-rangsangan dari kekuatan-kekuatan internasional, dan kurang mampu mengusahakan pertumbuhan perdagangan secara dinamis. Sebagian sangat besar warga negara Indonesia hidup di dalam sektor ini, hanya sebagian kecil orang-orang yang telah memperoleh pengaruh kehidupan Barat yang modern yang hidup di sektor pertama.⁶

Menurut Boeke, dalam arti ekonomi masyarakat memiliki tiga ciri, yakni semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Saling keterkaitan dan ketergantungan antara ketiga ciri tersebut disebut sistem sosial. Sistem Barat impor lebih maju karena menggunakan teknik maju dan standar kehidupan yang rata-rata sudah tinggi. Sementara sistem pertanian pribumi mempergunakan teknik sederhana, kesejahteraan sosial dan ekonomi yang rendah. Dengan demikian terjadi perbenturan dua sistem, sistem sosial impor dan sistem sosial asli, atau terjadi percampuran antara sosialisme dan kapitalisme.⁷

Untuk menghadapi kekuasaan ekonomi yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh orang asing dan keturunan asing tersebut pembentukan SDI (Sarekat Dagang Islam) sebenarnya dilatarbelakangi oleh tiga hal : pertama adalah kepentingan ekonomi kaum berjiwa pribumi, yakni melindungi kepentingan anggotanya dan membebaskan diri dari jaringan bisnis yang didominasi Cina. Kedua, semangat kemajuan yang termuat dalam ajaran Islam. Ketiga semangat kebangsaan sebagai respon terhadap bangkitnya semangat kebangsaan Cina di Hindia Belanda, karena dalam realita, Islam itu sendiri adalah simbol dari kepribumian atau kebangsaan.⁸ Dan dari segi anggotanya ialah "*Lapisan ngandap lan tengah*" *wong cilik*, massa yang terdiri dari bangsawan rendah, saudagar, para tukang, petani dan lain-lain⁹ Di samping itu S1 juga

⁶ Nasikun, *Sistem...*, hlm. 47. Mohammad Hatta melihat terbelahnya ekonomi modern Barat dan ekonomi tradisional bangsa Indonesia memberikan penilaian: bagaimana sedihnya nasib rakyat Indonesia yang banyak menderita serangan kapitalisme Barat yang cukup mempunyai alat, sedangkan bentengnya lagi diperteguhkan pula oleh kekuasaan kolonial, tukang penjaga keselamatannya"... "Peraturan jajahan sangat merugikan rakyat sehingga ia tak mudah bergerak untuk menyusun pertahanannya". Lihat, Melanie Sritua Arief (Ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 45.

⁷ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.17-5.18.

⁸ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm, 17.

⁹ Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm 100,1003.

menghadapi sistem kolonial dengan kapitalisme asing.¹⁰ Baru pertama kali dalam sejarah, gerakan sosial-politik dan keagamaan tergabung dalam satu gerakan sosial (SI). Kalangan menengah kecil pribumi yang mulai menyadari kepentingan-kepentingannya, petani yang dirugikan oleh kerja wajib perkebunan, kaum buruh yang kecewa dengan kapitalisme asing dan golongan agama, terwakili dalam gerakan ini. Dengan kata lain SI dapat mempersatukan elit dengan massa, kota dengan desa, dan kekuatan sosial dengan kekuatan budaya.¹¹

Ciri yang sangat menonjol ekonomi asli (Timur) adalah sebagai berikut:¹²

1. Kebutuhan masyarakat Timur adalah terbatas. Orang merasa puas jika kebutuhan-kebutuhan mendesak telah terpenuhi.
2. Orang lebih mengutamakan kebutuhan sosial dari pada kebutuhan ekonomi.
3. Barang lebih diukur dari nilai prestisnya dari pada nilai kegunaannya.
4. Industri pribumi hampir-hampir tidak memiliki organisasi, modal, dan secara teknis tidak berdaya dan tidak mengenal pasar.

Berdasarkan pada pengertian dualisme ekonomi Boeke di atas agaknya dapat dijadikan alat dalam memahami dualisme ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia hingga saat ini. Dualisme ekonomi di Indonesia mewujudkan bukan hanya diakibatkan oleh adanya perbedaan taraf pengembangan teknologi, melainkan juga akibat perbedaan falsafah, ideologi, dan sosial budaya, yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi.

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganut kolektivisme, terutama di pedesaan dan sebagian di perkotaan. Dalam masyarakat yang kolektivistik ini terdapat tradisi yang memunculkan sistem ekonomi tertentu yang tidak selalu sejalan dengan sistem ekonomi yang dominan. Ada sistem arisan, "sambatan" (kerja bakti), "nyumbang", dan sistem pertukaran lokal yang masih berkembang, meskipun sistem-sistem produksi dan keuangan modern berkembang pesat. Di pihak lain, perekonomian formal di pusat-pusat perkotaan tetap saja tidak mampu menampung banyaknya tenaga kerja yang akhirnya berusaha di sektor informal. Dalam struktur ekonomi nasional perbedaan antara pelaku ekonomi konglomerat dan pelaku ekonomi rakyat masih terlihat jelas. Disebabkan oleh kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai oleh pelaku ekonomi superior (modern) maka pelaku ekonomi inferior (tradisional) cenderung ter subordinasi. Meskipun

¹⁰ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm 123. Pada tahun 1920 Sesungguhnya Jawa pada khususnya sangat dirugikan oleh penggabungannya dengan ekonomi Hindia Belanda yang lebih luas dengan nilai tukar bersama yang tunggal lihat, H.W. Dick, "Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1990-an" dalam J. Thomas Limblad (Ed) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terj. Nawanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm,47.

¹¹Kuntowijoyo, *Budaya...*, hlm 116.

¹² Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.18.

tersubordinasi, pelaku ekonomi tradisional di pedesaan tetap berupaya mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang sesuai dengan sistem nilai dan sistem budaya mereka,¹³ sebagai bentuk resistensi terhadap sistem modern.

Realitas tersebut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. Dalam struktur dualistik yang timpang, dibutuhkan kebijakan afirmatif (pemihakan)¹⁴ kepada pelaku ekonomi kecil, rentan dan miskin. Jika tidak, kebijakan yang didesain secara makro deduktif cenderung selalu menguntungkan pelaku ekonomi sektor modern dan sebaliknya membawa korban pada kemerosotan kesejahteraan ekonomi rakyat yang pada umumnya bergerak di sektor informal, UKM, pertanian, dan wilayah pedesaan.

Sesungguhnya sektor pertanian adalah merupakan basis perekonomian Indonesia.¹⁵ Wajar apabila sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja, sebab memang mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Sektor pertanian dalam lapangan usaha atau produksi meliputi: (1) subsektor tanaman pangan; (2) subsektor perkebunan; (3) subsektor kehutanan; (4) subsektor peternakan; dan (5) subsektor perikanan.

Subsektor tanaman pangan atau sering disebut subsektor pertanian rakyat, biasanya diusahakan oleh rakyat, dalam arti bukan diusahakan oleh pemerintah atau perusahaan. Subsektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Adapun sektor perkebunan rakyat adalah yang perkebunan yang diusahakan oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam skala kecil-kecilan dan dengan menggunakan teknologi sederhana. Hasil tanaman perkebunan rakyat antara lain: karet, kopi, teh, tembakau, cengkeh, kapuk, kapas, coklat dan berbagai rempah-rempah.

Subsektor kehutanan terdiri dari tiga macam kegiatan yakni penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lain, dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu glondongan, kayu bakar, arang, dan bambu. Hasil hutan lain meliputi damar, rotan, getah kayu, kulit kayu, berbagai macam akar-akaran dan umbi kayu. Adapun kegiatan perburuan menghasilkan binatang-binatang liar seperti rusa, penyu, ular, buaya, dan madu. Sedangkan subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak itu sendiri dan pengusahaan hasil-hasilnya, seperti telur, susu segar, wool, dan hasil pemotongan hewan.

Adapun subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, dan keramba, termasuk pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan (pengeringan-

¹³ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.20.

¹⁴ Edy Suandi Hamid, *Ibid.*

¹⁵ Dumairi, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 204-205.

pengasinan). Subsektor ini tidak terbatas pada ikan akan tetapi juga udang, kepiting, ubur-ubur dan semacamnya.

Meskipun diakui bahwa dalam sistem dan struktur perekonomian, sektor informal bukan merupakan substansi utama, bahkan dapat dikatakan merupakan gejala sampingan sistem yang tidak berdaya dan tidak bekerja sempurna. Karena itu, apabila eksistensi sektor informal semakin marak, berarti ada distorsi dalam sistem ekonomi. Distorsi tersebut terjadi disebabkan karena kebijakan ekonomi tidak dijalankan dengan baik, penuh penyimpangan yang terkait dengan kekuasaan.¹⁶ Namun demikian, sesungguhnya sektor informal adalah sektor yang dapat menampung sebagian besar pelaku ekonomi, mulai dari sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Sektor informal mengisi dua pertiga dari sistem perekonomian nasional. Struktur ini merupakan bagian yang strategis di dalam sistem. Jumlah pekerja yang dapat diserap sektor informal pada tahun 2005 mencapai 61 juta orang atau 64 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Dan disebabkan penyerapan tenaga kerja sektor formal yang tidak signifikan, angka tersebut dapat meningkat dari waktu ke waktu.¹⁷

Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2004, lebih tinggi (63,2 persen). Dari 105,8 juta orang angkatan kerja yang ada, yang terserap dalam dunia kerja hanya sekitar 94,9 juta orang. Setiap enam bulan jumlah penganggur baru bertambah 600.000 orang, yang berarti sebagian dari pekerja baru tersebut diserap sektor informal. Dan memang sektor ini sejak dahulu berperan sebagai penyangga, baik pada masa normal ataupun masa krisis.¹⁸

Sesungguhnya hubungan antara ekonomi formal dan informal dapat dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan fungsional dan pendekatan konflik.¹⁹ Jika sektor informal berperan sebagai penyangga sektor formal maka berarti saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan ini misalnya ada pembangunan gedung di jalan Sudirman Jakarta atau kontruksi lain di suatu wilayah yang dilakukan pengembang formal, kemudian berdatangan penjual makanan yang menyediakan kebutuhan makanan yang diperlukan pekerja-pekerja harian yang dibayar murah oleh pengembang (formal). Hubungan ini mengungkap istilah: di mana ada gula di sana ada semut. Namun dari perspektif konflik, kehadiran penjual makanan di sekitar proyek pembangunan dengan harga yang murah bagi para pekerja sesungguhnya sangat membantu kelangsungan proyek tersebut, karena jika yang ada adalah penjual makanan (formal) maka biasanya tarif harganya lebih tinggi yang tentu akan memberatkan bagi para pekerja yang memang diingkosi murah. Dalam

¹⁶ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.21.

¹⁷ Edy Suandi Hamid, *Ibid.*

¹⁸ Edy Suandi Hamid, *Ibid.*

¹⁹ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm.171.

hal ini dapat dikatakan bahwa sektor informal mensubsidi sektor formal. Kata subsidi tersebut merupakan penghalus dari kata eksploitasi.

Bentuk distorsi negara dan kekuasaan yang mengakibatkan marak dan berkembangnya sektor informal antara lain: praktik monopoli, lisensi khusus kepada kelompok tertentu, eksistensi adanya koalisi distribusional, dan perburuan rente. Pada sektor informal terlihat indikasi labor surplus, di mana pekerjaan formal tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sistem ekonomi informal, yang jumlahnya sangat besar. Adapun ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut.²⁰

1. Upah/gaji yang tidak tetap, rendah, dan tidak memadai.
2. Produktivitasnya tidak maksimal, karena tidak menggunakan teknologi yang modern.
3. Tenaga kerja relatif kurang trampil.

Dengan demikian dapat dirunut bahwa sistem ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan ada masalah di hulu, yakni faktor ekonomi politik, seperti kebijakan ekonomi pada masa kolonial hingga pemerintahan Orde Baru. Meskipun telah mengantar ekonomi modern, pemerintahan orde baru tetap gagal melenyapkan dualisme ekonomi. Sebaliknya jika sistem ekonomi berjalan dengan baik, sektor formal bekerja efektif akan menyerap tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja, dan pada gilirannya sektor informal akan surut dan mengecil. Bahkan dalam banyak kasus, seperti di Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong, sektor industri, perdagangan, dan jasa lainnya kekurangan tenaga kerja (*labor shortage*), dikarenakan pekerjaan yang tersedia lebih banyak dari pada penawaran tenaga kerja.²¹

Faktor ekonomi politik yang menunjukkan lemahnya struktur dan kinerja ekonomi Indonesia terbukti dengan munculnya “kapitalisme semu” (*ersatz capitalism*) Asia Tenggara, seperti yang dikemukakan oleh Yoshihara Kunio. Kapitalisme semu ini didominasi oleh “pemburu rente” (*rent seekers*), kapitalis kroni (*crony capitalist*) dan kapitalis birokrat (*bureaucratic capitalist*). Menurut Kunio, bahwa yang mereka cari bukan hanya proteksi terhadap pesaing asing, tetapi juga koneksi, lisensi, hak monopoli dan subsidi pemerintah melalui pinjaman lembaga keuangan pemerintah dengan tingkat bunga rendah. Munculnya kapitalisme semu ini juga ditunjukkan oleh studi yang dilakukan oleh Yahya A. Muhaimin mengenai “pengusaha klien” (*client businessmen*) yang telah berlangsung sejak masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan terlebih lagi masa orde baru,²² seperti apa yang dikenal sebagai pengusaha Ali-

²⁰ Edy Suandi Hamid, *Modul....*, hlm. 5.21-5.22

²¹ Edy Suandi Hamid, *Ibid.*

²² Nurhadiantomo, “Demokrasi Politik dan Ekonomi Kerakyatan: Reaktualisasi dan Rekontekstualisasi Pemikiran Bung Hatta” dalam Melani Sritua Arief (Ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 63-64.

Baba. Dan menyertai perkembangan kapitalisme semu tersebut adalah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Di samping itu, sampai sekarang Indonesia tidak melakukan suatu reformasi sosial sehingga dialektika hubungan antara para aktor ekonomi kuat dengan para aktor ekonomi lemah tetap berlangsung seperti sejak zaman kolonial Belanda. Reformasi sosial seperti yang dikehendaki Mohammad Hatta, adalah reformasi yang mengandung pengertian koreksi terhadap dialektika hubungan ekonomi secara fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi di dalam masyarakat.²³ Hal ini dimaksudkan agar pelaku sektor ekonomi rakyat dapat berperan dan memiliki posisi tawar yang kokoh dalam hubungannya dengan sektor ekonomi modern dan konco-konconya yang secara langsung melakukan eksploitasi.

Pada umumnya fenomena sektor informal merupakan fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang sebagai konsekuensi logis dari kebijakan industrialisasi kapitalis modern yang bertujuan menghilangkan aktifitas ekonomi informal. Seperti ditunjukkan Portes dan Sassen, pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan industrialisasi seperti negara-negara Amerika Latin, sektor informal tetap bertahan malah memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang berarti. Karena itu asumsi bahwa aktifitas sektor informal merupakan transit, konsekuensi dari penetrasi yang tidak sempurna dari kapitalisme modern ke daerah-daerah yang kurang berkembang dan karena itu akan hilang dengan adanya industrialisasi, dipertanyakan dalam penerapannya, baik di negara yang sedang berkembang maupun di negara maju. Jadi fenomena sektor informal bukan melulu fenomena negara berkembang tetapi juga fenomena negara industri.²⁴ Mengapa di negara maju masih muncul ekonomi informal?

Setidaknya ada tiga hipotesis yang diajukan oleh beberapa ilmuwan: *pertama*, munculnya ekonomi informal dihubungkan dengan imigrasi. Di Amerika Serikat komunitas imigran telah menyumbangkan kebutuhan tenaga kerja bagi aktifitas ekonomi informal, memberikan tempat bagi pertumbuhannya, dan telah memperlengkapinya dengan semangat entrepreneurship untuk menggerakkannya. *Kedua*, informalisasi dan desentralisasi merupakan respon terhadap pertumbuhan kekuatan serikat buruh. Untuk menghindari aturan dan tuntutan serikat buruh, manajer formal akan melimpahkan sebagian produksi mereka kepada perusahaan yang berskala kecil, dan *ketiga*, informalisasi industri tertentu seperti konveksi merupakan siasat meghadapi kompetisi dengan negara-negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan kecil mengerjakan pesanan dari perusahaan besar melalui subkontaktor. Wanita dipekerjakan sebagai buruh yang kebanyakan

²³ Sritua Arief, "Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan", dalam Melanie Sritua Arief (Ed.), *Ibid.*, hlm. 25.

²⁴ Damsar, *Sosiologi Ekonomi...*, hlm.172.

tidak terorganisir dan merupakan sumber tenaga kerja yang murah. Agaknya informalisasi (seperti kesimpulan Beneria, Cappecchi dan Benton) merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh kondisi yang sedang berubah dalam ekonomi dunia, faktor-faktor politik lokal dan pola-pola sosial seperti peranan gender yang mempengaruhi alokasi tugas industrial.²⁵

Dengan demikian solusi yang paling logis adalah meng-*empowering* sektor informal. Konsep *trickle down effect* yang diharapkan akan terjadi penetesan "kue pembangunan" ke bawah, tidak pernah menjadi kenyataan,²⁶ dan kemudian muncul konsep *growth with redistribution*²⁷ yang menggabungkan konsep pertumbuhan dan pemerataan, di mana pembangunan ekonomi juga menfokuskan pada aspek-aspek kualitatif pembangunan yang mencakup kemiskinan, kesenjangan, dan pembangunan sumber daya manusia. Perbedaan utama dengan teori *trickle down effect* adalah terletak pada metode distribusi hasil pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep *trickle down effect* distribusi pendapatan disalurkan melalui instrumen fiskal dan pemberian santunan (seperti BLT) tanpa terlalu mementingkan keterlibatan rakyat banyak sebagai pelaku ekonomi. Sementara dalam konsep *growth with redistribution*, distribusi pendapatan dicapai, selain dengan mengendalikan yang formal/besar melalui kebijakan fiskal, juga dengan mengangkat kelompok kecil, dengan cara memberikan bekal dan ruang yang lebih besar kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sehingga mereka menikmati pendapatan yang tinggi secara langsung.

D. Penutup

Jika pemerintah dianggap sebagai urat nadi masyarakat, maka dalam menjalankan sistem ekonomi dualistik, peranannya sangat menentukan. Artinya apabila pemerintah menjalankan sistem ekonominya dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai, sehingga sektor informal dapat meningkatkan daya saing dan memiliki posisi tawar yang kokoh terhadap sektor modern, tidak malah sebaliknya semakin marak sebagai akibat kegagalan sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah.

²⁵ Damsar, *Sosiologi Ekonomi...*, hlm. 173-174.

²⁶ Teori ini menyatakan bahwa bila terjadi akumulasi modal di kalangan kelas atas dan menengah, kekayaan ini pada akhirnya menetes ke bawah. Orang-orang di bawah pasti akan "kecipratan" kekayaan ini, dalam bentuk lapangan kerja. Di samping itu macam-macam konsumsi dari orang-orang kaya akan memberikan penghasilan bagi orang-orang di bawah. Teori ketergantungan menyangkal terjadinya proses ini, karena sebagian besar kekayaan yang didapat akan dibelanjakan ke luar negeri, atau diekspor ke luar negeri dalam bentuk keuntungan perusahaan yang dibiayai oleh modal asing. Lihat. Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 67 dan 124.

²⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 22-23.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Eralangga, 1996.
- Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawulo*, Yogyakarta: Ombak, 2004.
- , *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Limblad, J. Thomas (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terj. Nawanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- McVey, Ruth (Ed.), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*, terj. A. Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- M. Dawam Rahardjo, "Pasang Surut Pengusaha Muslim: Tinjauan Sosiologis", Jakarta: Festival Istiqlal, 1996.
- Melanie Sritua Arief (Ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Rahmat Fajri, *Etos Kerja dalam Islam dan Kristen: Tinjauan Historis di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Raja, 2005.
- Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*, Jakarta: KPG, 2002.

*) Drs. **Rahmat Fajri**, M. Ag., Staf Pengajar Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

